DAFTAR PERIKSA (*CHECKLIST*)

PROSEDUR PENCEGAHAN KORUPSI YANG MEMADAI BAGI KORPORASI

Nama Lengkap :

Nama Perusahaan/Organisasi :

Nomor HP :

| **No.** | **Indikator** | **Ya** | **Tidak** | **Bukti Berupa Dokumen** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **KOMITMEN** |  |  |  |  |
| I.1 | Apakah manajemen puncak korporasi seperti pemilik, direksi, dan komisaris memiliki komitmen anti-korupsi tertulis?   1. Tunjukkan Komitmen tertulis antikorupsi 2. Tunjukkan bukti deklarasi Komitmen antikorupsi, siapa yang menghadiri 3. Mengkomunikasikan Komitmen secara tertulis (Email, Sharing session, dll) 4. Apakah komitmen manajemen puncak telah memicu kebijakan antikorupsi di lini organisasi, buktikan. |  |  |  |  |
| I.2 | Apakah terdapat pernyataan anti-korupsi yang harus ditandatangani seluruh pegawai korporasi seperti tercantum dalam kontrak kerja atau formulir pernyataan lainnya?   1. Tunjukkan Pakta Integritas/Kontrak kerja tersebut (Sampling semua level Manajer) 2. Tunjukkan bahwa isi pakta sekurang-kurangnya melarang pemberian uang pelicin maupun suap kepada *Regulator* |  |  |  |  |
| I.3 | Apakah kebijakan dan/ atau peraturan ini memiliki definisi tentang korupsi?   1. Tunjukkan kebijakan dan/atau peraturan yang memiliki definisi tentang korupsi. Bandingkan! (Definisi korupsi bisa dari berbagai sumber) |  |  |  |  |
| I.4 | Apakah terdapat kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi tertulis yang mengacu kepada UU Tipikor yang wajib ditaati seluruh pegawai korporasi?   1. Tunjukkan Kebijakan dan/atau peraturan antikorupsi tertulis yang mengacu pada UU tipikor . Bandingkan. |  |  |  |  |
| I.5 | Apakah kebijakan dan/ atau peraturan ini memberikan penjelasan di mana saja korupsi kemungkinan besar terjadi?   1. Tunjukkan Kebijakan/peraturan yang mengandung penjelasan peta rawan korupsi. |  |  |  |  |
| I.6 | Apakah korporasi mempunyai unit atau individu tertentu yang memastikan upaya kontrol dalam mencegah korupsi?   1. Tunjukkan Unit atau individu yang menyelenggarakan fungsi kepatuhan 2. Tunjukkan Surat Pengangkatan dan wewenang Individu tersebut 3. Tunjukkan SOP Unit tersebut 4. Tunjukkan Rasio Perbandingan Jumlah pegawai yang menjalankan fungsi kepatuhan dengan Total Pegawai korporasi \*cari Best Practice 5. Buktikan Kompetensi Individu yang menangani kepatuhan (CCO, API, Auditor, SPIP, dll) |  |  |  |  |
| I.7 | Apakah unit atau individu tertentu ini bertanggung jawab atas rekomendasi audit internal?   1. Tunjukkan lingkup Tanggung jawab Unit atau Individu tersebut atas audit internal |  |  |  |  |
| I.8 | Apakah unit atau individu tertentu ini memiliki kontribusi dalam pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi?   1. Tunjukkan Komitmen tertulis untuk mekanisme pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai Korporasi 2. Tunjukkan Bukti Pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai Korporasi |  |  |  |  |
| I.9 | Apakah unit atau individu tertentu ini melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan korupsi?   1. Tunjukkan Komitmen Unit atau individu untuk melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan korupsi (Workplan, Rencana kerja, Agenda kegiatan, dll) 2. Tunjukkan bukti pelaksanaan tersebut (Laporan Pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, 3. Tunjukkan Bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan |  |  |  |  |
| **II** | **PERENCANAAN** |  |  |  |  |
| II.1 | Apakah korporasi melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi?   1. Buktikan adanya fungsi pelaksana yang melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi. 2. Buktikan kertas kerja pemetaan resiko yang mencakup titik rawan dan modus korupsi (Risk Register, Perencanaan mitigasi, monev mitigasi) 3. Tunjukkan adanya penentuan tingkat kerawanan resiko |  |  |  |  |
| II.2 | Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan atas seluruh aktivitas organisasi korporasi?   1. Tunjukkan buktinya (apakah penilaian resiko korupsi dilakukan di seluruh atau beberapa unit?). |  |  |  |  |
| II.3 | Apakah penilaian risiko korupsi dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan perkembangan modus korupsi?   1. Tunjukkan bukti penilaian resiko dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan Modus korupsi dan praktik baik, contoh: Laporan pelaksanaan Mitigasi Resiko dan beberapa *risk register* yang diperbaharui. |  |  |  |  |
| **III** | **PELAKSANAAN** |  |  |  |  |
| III.1 | Apakah korporasi melakukan uji tuntas atas penilaian risiko korupsi terhadap karyawan, pelanggan, distributor, vendor, dan agen?   1. Tunjukkan dokumen yang menunjukkan uji tuntas atas penilaian resiko korupsi:  * karyawan * pelanggan * distributor/vendor/agen  1. Tunjukkan hasil verifikasi dan analisis uji tuntas penilaian resiko korupsi:  * karyawan * pelanggan * distributor/vendor/agen |  |  |  |  |
| III.2 | Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi juga mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi?   1. Tunjukkan Perjanjian atau kontrak yang menunjukkan peraturan anti-korupsi untuk mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi (Sampling) |  |  |  |  |
| III.3 | Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak internal dan eksternal korporasi?   1. Tunjukkan Perjanjian kerja yang menunjukkan peraturan anti-korupsi dimana mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi bagi pihak internal. (Sampling) 2. Tunjukkan Bukti Klausul anti-korupsi pada Perjanjian atau kontrak pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, pihak ketiga (konsultan, akuntan publik, pengacara), agen, dan vendor yang mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak eksternal korporasi (Sampling) |  |  |  |  |
| III.4 | Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi memuat tentang:   * pengaturan gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (sektor publik) * Pengaturan praktik pemberian/ penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal * pengaturan kontribusi dana politik * pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal  1. Tunjukkan Bukti Kebijakan atau peraturan antikorupsi untuk: 2. pengaturan gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (sektor publik) 3. Pengaturan praktik pemberian/ penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor baik di lingkup internal maupun eksternal 4. pengaturan kontribusi dana politik 5. pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal 6. Tunjukkan bukti Klausul yang memuat batasan nilai dan bentuk Gratifikasi yang boleh atau tidak boleh diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 7. Tunjukkan bukti klausul yang memuat batasan nilai dan bentuk praktik pemberian/ penerimaan fasilitas hadiah, sponsor yang boleh dan tidak boleh baik di lingkup internal maupun eksternal 8. Tunjukkan bukti klausul yang memuat tentang pengaturan kontribusi dana politik yang boleh dan tidak boleh 9. Tunjukkan bukti klausul yang memuat tentang pengaturan konflik kepentingan baik di internal maupun eksternal |  |  |  |  |
| III.5 | Apakah korporasi menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi?   1. Tunjukkan bukti atas penetapan pemilik manfaat korporasi kepada instansi berwenang. Salah satu di antara dokumen berikut:  * anggaran dasar; * dokumen perikatan pendirian korporasi; * dokumen keputusan rapat umum pemegang saham, dokumen keputusan organ yayasan, dokumen keputusan rapat pengurus, atau dokumen keputusan rapat anggota; * informasi instansi berwenang; * informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas; * informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat dari korporasi bagi pemilik manfaat; * pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; * dokumen yang dimiliki oleh korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan perseroan terbatas; * dokumen yang dimiliki oleh korporasi atau pihak lain yang menunjukkan bahwa orang perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan dalam korporasi; * dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya \*Pasal 11 Perpres No.13/2018) |  |  |  |  |
| III.6 | Apakah korporasi mempunyai sistem pelaporan dan pengaduan atas dugaan adanya tindak pidana korupsi dimana dijamin kerahasiaan, perlindungan, dan keamanannya bagi pelapor, baik internal maupun eksternal?   1. Buktikan adanya sosialisasi tentang Sistem Pelaporan dan Pengaduan secara periodik 2. Tunjukkan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaporan Pengaduan 3. Tunjukkan saluran pelaporan yang dimiliki (Contoh: aplikasi, *call centre*, sms, datang langsung, dll) 4. Tunjukkan bukti adanya fungsi pelaksana internal maupun eksternal pengelola Sistem Pelaporan dan Pengaduan (Contoh: dapat ditunjukkan dengan Surat Keputusan (SK)/dokumen uraian pekerjaan (*job description),* dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan eksternal) 5. Buktikan bahwa terdapat penanganan berjenjang 6. Tunjukkan bukti statistik pelaporan yang masuk dan yang diselesaikan serta rekomendasinya 7. Buktikan adanya Evaluasi terhadap sistem pelaporan dan pengaduan secara periodik. |  |  |  |  |
| III.7 | Apakah korporasi sudah memenuhi standard pencatatan keuangan, dokumentasi, pengarsipan keuangan, dan administrasi lain yang transparan dan akuntabel?   1. Tunjukkan kebijakan Sistem Pencatatan, Keuangan, dokumentasi 2. Pastikan terdapat pengaturan tentang persetujuan berjenjang untuk biaya operasional dan belanja modal 3. Tunjukkan bahwa dokumen disimpan dengan baik sesuai dengan urutan yang ditetapkan 4. Pastikan adanya system penyimpangan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. |  |  |  |  |
| III.8 | Apakah korporasi mensosialisasikan kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi secara berkala kepada seluruh pegawai?   1. Tunjukkan kebijakan adanya program Sosialisasi/Peraturan Antikorupsi 2. Tunjukkan bukti kegiatan sosialisasi (contoh: laporan kegiatan dan dokumentasi) 3. Pastikan media yang digunakan menjangkau seluruh pegawai (Contoh: email, poster, dll) 4. Tunjukkan apakah korporasi menerima feedback dari pegawai baik terhadap program antikorupsi maupun fakta lapangan (contoh: survey pegawai) |  |  |  |  |
| **IV** | **EVALUASI** |  |  |  |  |
| IV.1 | Apakah korporasi mempunyai sistem pemantauan dan evaluasi atas peraturan anti-korupsi?   1. Tunjukkan bahwa korporasi memiliki kebijakan pemantauan dan evaluasi peraturan antikorupsi (contoh: peraturan monev) 2. Tunjukkan korporasi telah menentukan area yang perlu dievaluasi dan menentukan cara pengukurannya 3. Adakah unit yang melakukan pemantauan dan evaluasi di korporasi? 4. Tunjukkan jadwal pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh unit yang melakukan pemantauan |  |  |  |  |
| IV.2 | Apakah sistem pemantauan dan evaluasi anti-korupsi dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh pegawai korporasi?   1. Adakah media untuk mengkomunikasikan sistem pemantauan dan evaluasi anti-korupsi kepada seluruh pegawai korporasi secara berkala (contoh: rapat, pertemuan, email, dll) |  |  |  |  |
| IV.3 | Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terkait korupsi dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh manajemen korporasi sebagai pembelajaran?   1. Tunjukkan bahwa hasil pemantauan telah disampaikan kepada manajemen (contoh: rapat, pertemuan, email, dll) 2. Tunjukkan bahwa evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peraturan anti korupsi (hasil audit) |  |  |  |  |
| IV.4 | Apakah korporasi mempunyai *Audit Charter*?   1. Tunjukkan bukti adanya *Audit Charter* (piagam) 2. Tunjukkan bahwa Audit / Pemeriksaan Internal bersifat independen (Struktur, Anggaran, Sumber Daya, dll) 3. Tunjukkan bahwa Audit / Pemeriksaan Internal diberikan kewenangan luas untuk menilai pengendalian internal khususnya area risiko korupsi (program audit melingkupi seluruh aktifitas operasional korporasi) |  |  |  |  |
| **V** | **RESPON** |  |  |  |  |
| V.1 | Apakah korporasi tergabung dalam Asosiasi Bisnis/ Perkumpulan Profesi?   1. Tunjukkan bukti keanggotaan korporasi dalam Asosiasi Bisnis/ Perkumpulan profesi. 2. Apakah dalam Asosiasi Bisnis/ Perkumpulan Profesi tersebut terdapat agenda yang membahas isu korupsi? |  |  |  |  |
| V.2 | Apakah korporasi terlibat dalam aksi kolektif kolaborasi anti-korupsi?   1. Tunjukkan bukti adanya keterlibatan aktif korporasi dalam forum komunikasi antar pemangku kepentingan dalam suatu kelompok kerja anti-korupsi. (contoh: laporan, workshop, dokumentasi, dll) 2. Tunjukkan bukti adanya keterlibatan aktif korporasi dalam forum komunikasi lintas sektoral (lembaga non-pemerintah, yayasan, akademisi, instansi pemerintah, dll) yang mengangkat isu anti-korupsi. |  |  |  |  |
| V.3 | Apakah korporasi melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum?   1. Tunjukkan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum. 2. Bila ada, tunjukkan data statistik korporasi atas Pelaporan indikasi tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, atau bentuk pungutan liar lainnya yang dilakukan oleh oknum regulator dan/atau penegak hukum. |  |  |  |  |